



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup nelayan, meskipun dalam implementasinya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selalu tidak berpihak kepada nelayan atau lemahnya penerapan hukum regulasi tersebut. Kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah dimulai dari keluarnya kebijakan Revolusi Biru sejak tahun 1970-an hingga regulasi di tingkat undang-undang pada saat ini. Bila di bidang pertanian pada saat yang sama pemerintah mengeluarkan kebijakan Revolusi Hijau dalam rangka modernisasi sistem pertanian untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan petani, Revolusi Biru dikeluarkan oleh pemerintah sebagai kebijakan politik perikanan yang pada awalnya ingin mengikuti *success story* di bidang pertanian. Target Revolusi Biru adalah peningkatan kesejahteraan nelayan melalui upaya peningkatan efisiensi dan produktifitas perikanan khususnya sumberdaya laut dengan berbagai varian kebijakan mulai dari modernisasi penggunaan motorisasi dan teknologi alat tangkap yang modern; kebijakan pemberian fasilitas kredit berupa kredit usaha, mesin-mesin, perahu-perahu dan peralatan penting kepada nelayan; pembangunan fasilitas infrastruktur yang mendukung kegiatan perikanan agar menjamin efektivitas dan peningkatan produksi berupa pelabuhan perikanan, ruang pendingin, tempat pengeringan ikan dan pelelangan ikan (TPI). Pada tahun 1980 – 1996 kebijakan ini diperbaharui dengan diluncurkannya deregulasi perikanan yang mencakup pengembangan alat tangkap, pembangunan pelabuhan dan penambahan armada penangkapan ikan melalui kemampuan produksi dalam negeri maupun impor kapal bekas serta pemberian izin kapal asing.



Dampak kebijakan Revolusi Biru yang dikeluarkan pemerintah memang cukup fantastis yakni sejak tahun 1970 hingga 2003 terjadi peningkatan produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya. Hal ini dikarenakan Revolusi Biru yang didukung aktifitas usaha berskala besar dan padat modal menjustifikasi adanya penetrasi kapitalisme yang tidak berbasis pada kemandirian nelayan kecil dan petani ikan. Secara khusus ada enam implikasi yang muncul akibat dari perkembangan ini (Tridoyo, 2004). Pertama, degradasi sumberdaya ikan, penurunan daya dukung lingkungan laut dan kerusakan ekosistem; kedua, menciptakan ketimpangan kelas yang lebar antara pemilik kapal dan buruh nelayan; ketiga, degradasi hutan mangrove dan pengalihan lahan tambak kepada pemodal; keempat, konflik ruang di wilayah pesisir yang disebabkan oleh wilayah kegiatan perikanan, pelabuhan, pariwisata, industri maupun kawasan konservasi; kelima, rendahnya kapasitas sumberdaya manusia nelayan sehingga produktifitas mereka juga rendah; dan keenam ketidakadilan struktural yang merugikan nelayan miskin dalam keterbatasan akses modal.

Upaya lain yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup nelayan diantaranya melalui program penyaluran kredit usaha kepada nelayan, bantuan subsidi bahan bakar minyak (BBM), Keputusan Menteri Pertanian No. 607.Kpts/Um/9/1976 tentang pembagian wilayah penangkapan berdasarkan tingkat kualifikasi peralatan tangkap yang dimiliki oleh nelayan, Keppres No.39/1980 tentang penghapusan operasi kapal pukat harimau, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta lahirnya Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat yang mengalokasikan dana sebesar Rp.927,82 milyar untuk mensejahterakan nelayan. Dalam kenyataannya penegakkan regulasi dan implementasi program-program tersebut hingga saat ini sangat lemah dan mengindikasikan seolah-olah regulasi



dan kebijakan tersebut tidak pernah ada sebagaimana stagnasi peningkatan kesejahteraan hidup nelayan. Ujungnya, pengalokasian sumberdaya dan sumberdana dalam sistem perikanan tangkap bagi nelayan kecil masih jauh dari kondisi yang dapat meningkatkan kualitas hidup nelayan.

Sistem kegiatan perikanan tangkap nelayan artisanal terdiri dari 4 (empat) aspek kegiatan (Kusnadi, 2001), Charles (2001) yaitu (a) kegiatan dalam bidang penggunaan teknologi alat tangkap dan alat bantu tangkap berkait dengan *capital dynamics* yaitu armada, alat tangkap (*fleet*) dan alat bantu tangkap yang mendorong hasil tangkapan maksimal dengan dampak seminimal mungkin terhadap lingkungan fisik; (b) kegiatan dalam bidang kegiatan persiapan dan operasi penangkapan yang berisi tentang kemampuan nelayan menentukan waktu musim ikan, lokasi penangkapan ikan, ukuran dan jenis ikan yang boleh ditangkap serta kondisi cuaca yang memungkinkan untuk melaut; (c) kegiatan dalam bidang pengerahan tenaga kerja dan modal yang berisi tentang kemampuan nelayan untuk mengoptimalkan tenaga kerja dan modal yang ada dalam mengoperasikan perahu beserta alat tangkap; dan (d) kegiatan dalam bidang menjaga mutu hasil tangkapan dan pemasaran ikan berkait dengan kemampuan nelayan mengupayakan mutu ikan yang baik tetap terjaga untuk mencapai harga jual ikan yang setinggi-tingginya.

Merujuk kepada perspektif *Theory Planned Behavior* (Ajzen, 2005) yang menempatkan komponen sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjectif norm*) dan keyakinan kemampuan berperilaku (*perceived behaviour control*) dan **tahun keberadaan di sekolah atau tingkat pendidikan (*educations level*)** sebagai aspek yang mempengaruhi niat untuk berperilaku (*behaviour intention*). untuk memperkirakan perilaku (*behaviour*),

Pemanfaatan sumberdaya perikanan yang sehat dan menjamin kelestariaanya sangat bergantung kepada aspek pengendalian perilaku dari para



penggunanya, maka dalam upaya menjaga kelestarian sumberdaya perikanan tersebut diperlukan suatu penelitian yang bertujuan untuk melihat seberapa besar distribusi tingkat pendidikan memberikan pengaruh kepada pola berperilaku dari para pengguna sumberdaya perikanan.

1.2 Perumusan Masalah

Dari permasalahan perilaku nelayan yang timbul di wilayah pesisir tersebut maka akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap pemanfaatan sumberdaya yang ada di pesisir terutama ikan sebagai komoditas utamanya. Maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana tingkat pendidikan nelayan di lokasi penelitian dan menetapkan kategorinya?
- 2) Bagaimanakah perilaku nelayan dalam melakukan pengelolaan sumberdaya perikanan dan menetapkan kategorinya?
- 3) Bagaimanakah kesiapan pemerintah dalam mengatasi perilaku nelayan berdasarkan pengelolaan sumberdaya ikan di lokasi penelitian?
- 4) Apa saja rekomendasi yang realistis tentang pengelolaan sumberdaya ikan di lokasi penelitian, agar dapat digunakan para stakeholder terkait?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

- (1) Mengetahui perilaku nelayan di lokasi penelitian dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan dan menetapkan kategorinya.
- (2) Mengetahui tingkat pendidikan nelayan di lokasi penelitian, dan menetapkan kategorinya.
- (3) Mengetahui distribusi nelayan di lokasi penelitian berdasarkan kategori kategori yang ditetapkan, baik tingkat pendidikan maupun perilakunya.



- (4) Berdasarkan hasil analisa tersebut diatas menyusun suatu formulasi rekomendasi realistis tentang pemanfaatan sumberdaya perikanan.

1.4 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini disesuaikan dengan kerangka acuan kerja adalah sebagai berikut :

- (1) Mengidentifikasi tingkat pendidikan nelayan dilokasi penelitian dan menetapkan kategorinya
- (2) Mengobservasi perilaku nelayan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan dan menetapkan kategorinya
- (3) Menganalisa kesiapan pemerintah dalam mengatasi perilaku nelayan berdasarkan pengelolaan sumberdaya ikan dilokasi penelitian.
- (4) Menyusun rekomendasi realistis tentang pengelolaan sumberdaya ikan dilokasi penelitian, agar dapat digunakan para stakeholder terkait.

1.5 Hasil Yang Diharapkan

Dari tujuan tersebut diharapkan dari penelitian pengaruh perilaku nelayan terhadap pengelolaan sumberdaya ikan di kawasan pantai utara Jawa Timur dapat dijadikan dasar dalam penentuan kebijakan pembangunan sektor perikanan dan kelautan di wilayah pantai utara Jawa Timur.